

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Tahun 2010-2023

Defi Permatasari^{*1}, Asis Riat Winanto², Sayid Abas,³

^{*1,2,3} Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur

Correspondence: defipermata31@gmail.com

Received: 23 November 2024 | Revised: 30 November 2024 | Accepted: 10 Desember, 2024

Keywords:

Inflation; Provincial Minimum Wage; The labor force participation rate; Unemployment Rate.

Abstract

The labor problem that often occurs in Indonesia is unemployment. The high level of unemployment has a direct impact on various aspect of life, especially in the socio-economic dimension. This study aims to analyze the factors that allegedly affect the unemployment rate, namely the labor force participation rate, provincial minimum wage, and inflation. The data used is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and Bank Indonesia. The analysis technique applied is multiple linier regression analysis using time series data for the period 2010-2023. The result of the analysis shows that simultaneously, the labor force participation rate, provincial minimum wage, and inflation have no significant influence on the open unemployment rate with a significance level (α) of 5%. However, partially only the provincial minimum wage has an effect on the open unemployment rate, while the labor force participation rate and inflation show no significant effect partially on the open unemployment.

Kata Kunci:

Inflasi; Tingkat Pengangguran Terbuka; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Upah Minimum Provinsi.

Abstract

Masalah ketenagakerjaan yang kerap terjadi di Indonesia adalah pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan terutama dalam dimensi social-ekonomi. Penelitian ini mempunyai tujuan dalam menganalisa aspek yang diperkirakan memberikan pengaruh pada tingkat pengangguran, ialah tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum provinsi, serta inflasi. Data yang dimanfaatkan ialah data sekunder yang didapatkan atas BPS serta BI. Teknik analisis yang diaplikasikan merupakan analisis regresi linier berganda secara menerapkan data time series periode 2010-2023. Hasil analisis memperlihatkan kalau dengan cara simultan, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum provinsi, serta inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat signifikansi (α) 5%. Namun, secara parsial hanya upah minimum provinsi yang berdampak pada tingkat pengangguran terbuka, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja dan inflasi tidak menunjukkan dampak signifikan pada tingkat pengangguran terbuka.

PENDAHULUAN

Bidang ketenagakerjaan adalah salah satu masalah yang dapat mempengaruhi perekonomian negara berkembang (Sinaga, M. E R , Roziani, 2023). Tingginya tingkat pengangguran adalah masalah mendasar dalam ketenagakerjaan. Pengangguran dapat mengganggu perekonomian daerah karena dapat memicu kemiskinan dan masalah social (Pujoalwanto, 2014).nBerdasarkan data dari IMF (International Monetary Fund), beberapa negara ASEAN, Indonesia ialah negara atas tingkat pengangguran tertinggi yang mencapai 5,2% per April 2024. Meskipun pengangguran juga menjadi masalah di negara maju, penanganannya relatif cepat. Sebaliknya, di negara berkembang, masalah pengangguran lebih kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, ledakan penduduk, minimnya investasi, serta isu sosial dan politik (Kartika & Muslim, 2013).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan metode penghitungan pengangguran dengan membandingkan jumlah penganggur dengan total angkatan kerja. Penurunan TPT di Indonesia selama tiga tahun terakhir menunjukkan semakin lebih banyak tenaga kerja yang terserap. Peningkatan penyerapan tenaga kerja ini terpengaruh sama banyak aspek, semisal meningkatnya partisipasi angkatan kerja, kenaikan upah minimum, serta terkendalinya inflasi (Prakoso, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya berfokus pada tingkat pengangguran terbuka tetapi juga ada faktor lain seperti tingkat partisipasi angkatan kerja. TPAK ialah total angkatan kerja pada masyarakat umur produktif. Menurut Mulyadi, lebih baik jika tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat sejalan sama partisipasi penduduk yang bekerja. Tetapi, apabila hal ini muncul kebalikannya, hal ini tentunya tidak baik. Maka kata lainnya, kurangnya lapangan kerja hendak menyebabkan pengangguran meningkat dikarenakan batasan lowongan pekerjaan untuk mengayomi angkatan kerja. TPAK Indonesia setiap tahunnya cenderung fluktuatif dan tidak stabil (Widiantari et al., 2024). Berdasarkan data yang diakses pada BPS terlihat bahwa TPAK tertinggi pada tahun 2023 sebesar 69,48% yang sebelumnya berada di 68,63%. TPAK meningkat setiap tahunnya meskipun pengangguran sempat menurun pada tahun 2018, selama 3 tahun terakhir pengangguran kembali naik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kartika & Muslim, 2013) TPAK memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pengangguran. Penelitian mendukung temuan ini oleh (Badria, 2022) yang membuktikan bahwa TPAK mempunyai pengaruh yang signifikan. Tetapi hasil itu berlawanan sama hasil penelitian (Widiantari et al., 2024) bahwa TPAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran.

Adapun faktor yang kedua yaitu upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi ialah besaran bayaran yang diterapkan di setiap kabupaten ataupun kota dalam satu provinsi. Terlihat data di BPS kalau upah minimum provinsi di Indonesia terus merasakan kenaikan pertahunnya. Namun, meskipun upah meningkat, hal ini belum berhasil menurunkan tingkat pengangguran. Upah yang tinggi mempengaruhi total angkatan kerja yang bekerja, karena makin tinggi upah yang ditentukan, makin besar pula beban produksinya. Hal ini menjadikan, bagi efisiensi, industri seringkali harus mengurangi jumlah tenaga kerja, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran (Indriani, 2019). Teori Keynes dalam (Widiantari et al., 2024) menjelaskan bahwa penetapan upah yang melebihi titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja,

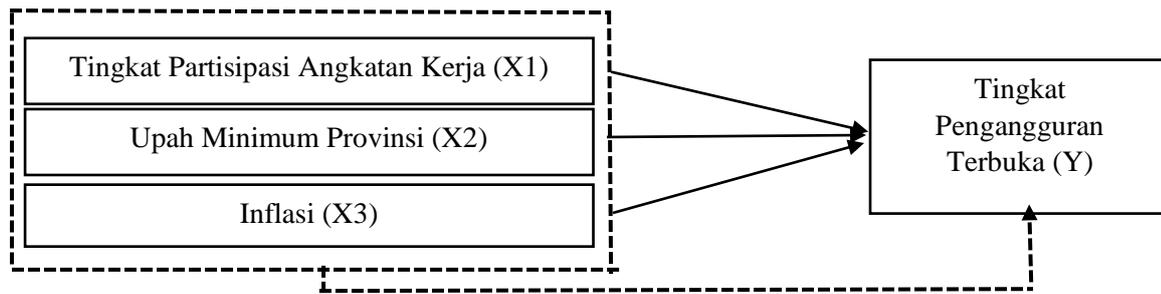
sehingga menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan menyebabkan pengangguran. Berdasarkan penelitian (Badria, 2022) UMP memiliki dampak yang signifikan terhadap pengangguran. Seterusnya, pada penelitian yang diteliti (Kartika & Muslim, 2013) juga mengatakan jika upah minimum provinsi terdapat dampak positif serta signifikan bagi tingkat pengangguran. Namun (Setiawan, K., Haikal, M., Wicaksana, A. G., & Dermawan, 2023) menjelaskan pada studinya perihal tidak ditemukannya dampak yang signifikan dari UMP akan TPT.

Faktor yang ketiga adalah inflasi. Inflasi ialah gejala ekonomi yang bagus untuk di didiskusikan, seperti terkait efeknya pada tingkat pengangguran (Seruni, 2012). Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga rata-rata barang serta jasa terjadi kenaikan yang dapat berlangsung dengan cara berkelanjutan. Persoalan inflasi sangat terkait dengan tenaga kerja, karena ketika harga di berbagai sektor naik, pengusaha cenderung mengurangi jumlah pekerja sehingga mengakibatkan pengangguran (Wahab, 2022). Teori yang mendukung adalah teori A.W.Philips dalam (Hartati, 2020) yang mengatakan bahwa ada keterkaitan yang kuat diantara inflasi sama tingkat pengangguran, di mana inflasi tinggi untuk itu tingkat pengangguran rendah. Ketika harga meningkat, produsen berupaya memenuhi permintaan dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan tenaga kerja. Akibat dari peningkatan jumlah tenaga kerja ini, inflasi yang tinggi disertai dengan penurunan tingkat pengangguran. Namun berbanding terbalik dengan teori Keynes yang mengatakan apabila saat tingkat pengangguran tinggi, daya beli masyarakat mengalami penurunan akibat rendahnya pendapatan. Kondisi ini melemahkan permintaan agregat yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Badria, 2022) dan (Nuraeni, A., et al., 2024) menjelaskan, inflasi memiliki dampak yang signifikan pada tingkat pengangguran terbuka. Namun berbanding terbalik sama riset (Fahrezi, 2018) dan (Kartika & Muslim, 2013) yang mengatakan kalau inflasi belum memiliki dampak yang signifikan akan tingkat pengangguran.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya (Simbolon, C.M., 2023) (Badria, 2022) terkait penggunaan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum provinsi dalam menganalisis pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran terbuka. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menambahkan variabel inflasi, yang belum menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya. Hal ini memberikan kontribusi yang lebih luas dan spesifik dalam memahami hubungan antara tingkat partisipasi Angkatan kerja, upah minimum provinsi, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia selama periode 2010-2023.

METODE

Jenis riset ini ialah penelitian kuantitatif yang memakai data sekunder yang diperoleh langsung berlandaskan Data BPS serta Bank Indonesia dengan data time series tahun 2010-2023. Teknik pengambilan data menggunakan metode studi kepustakaan dan metode basis data. Teknik analisis yang dimanfaatkan dalam studi ialah regresi linier berganda. Data diolah memanfaatkan aplikasi software SPSS versi 24. Pengukuran variabel TPAK dari (Rahmani, 2021), UMP dari (Fahrezi, 2018), serta inflasi dari (Fahrezi, 2018).



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}
------------------------	---------------------

Sumber: SPSS, data diolah 2024

Berlandaskan dalam tabel 1, dipahami jika unstandardized residual mengandung skor Asymp Sig (2-tailed) senilai $0,200 > 0,05$, untuk itu bisa dinyatakan data mempunyai distribusi normal.

Tabel 2 Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TPAK	.859	1.164
	UMP	.667	1.500
	Inflasi	.722	1.385

Sumber: SPSS, data diolah 2024

Dari pengolahan uji multikolinieritas di tabel 2 bisa dikatakan kalau tidak adanya multikolinieritas karena hasil yang diperoleh menunjukkan pada variabel independent atau bebas dengan angka *Tolerance* serta VIF pada variabel TPAK yaitu sebesar 0,859 dan 1,164, Upah Minimum Provinsi sebesar 0,667 dan 1,500, serta Inflasi sebesar 0,722 dan 1,385 artinya angka *Tolerance* berarti $> 0,10$ serta angka VIF berarti $< 10,00$.

Tabel 3 Uji Heterokadistasitas
Correlations

			TPAK	UMP	inflasi	Unstandardized Residual
Spearman's rho	TPAK	Correlation	1.000	.319	-.165	.027
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	.	.267	.573	.929
		N	14	14	14	13
	UMP	Correlation	.319	1.000	-	-.126
		Coefficient			.666**	
		Sig. (2-tailed)	.267	.	.009	.681
		N	14	14	14	13
	Inflasi	Correlation	-.165	-	1.000	.302
		Coefficient		.666**		
		Sig. (2-tailed)	.573	.009	.	.316
		N	14	14	14	13
Unstandardized Residual	Correlation	.027	-.126	.302	1.000	
	Coefficient					
	Sig. (2-tailed)	.929	.681	.316	.	
	N	13	13	13	13	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: SPSS, data diolah 2024

Berlandaskan pemaparan di atas, nilai residual mempunyai nilai sig.tailed (2-tailed) > 0,05 di mana tiap-tiap variabel yaitu 0,929; 0,681; 0,316. Maka kesimpulan yang diperoleh adalah tidak ada gejala heterokadistasitas.

Tabel 4 Uji Autokorelasi, Koefisien Determinasi, Koefisien Korelasi

Model Summary ^b						
Mod	R	R Square	Adjusted R Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.678 ^a	.460	.279		.60633	1.818

Sumber: SPSS, data diolah 2024

Berlandaskan pemaparan di atas, dapat disimpulkan kalau nilai DW senilai 1,818 dibedakan sama nilai tabel DW atas nilai N=14 serta 3 variabel independent (k), hingga pada tabel DW hendak dihasilkan skor (DL) = 0,7667 serta skor (DU) = 1,7788 hingga 4-DU = 4 - 1,7778 = 2,212. Berdasarkan Output bisa ditinjau nilai DW senilai 1,818. Sebab nilai DW ada dari DU serta 4-DU (1,7788 < 1,818 < 2.212) sehingga mustahil berlangsungnya autokorelasi.

Dan diketahui bahwa nilai R² yaitu 0,460 ataupun 46%. Hal ini membuktikan kalau variabel X1, X2, dan X3 mampu mempengaruhi variabel Y senilai 46% dan selebihnya senilai

54% terpengaruh sama variabel lainnya diluar model riset. Serta menunjukkan bahwa R yaitu 0,678, artinya adanya hubungan tinggi diantar variabel independen ialah TPAK, UMP, serta inflasi dengan variabel depeneden ialah tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 5 Analisis Regresi Linier Berganda, Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1 (Constant)	-14.636	12.293		-1.191	.264
TPAK	.334	.184	.479	1.813	.103
UMP	-7.864E-7	.000	-.721	-2.401	.040
inflasi	-.027	.095	-.081	-.280	.786

Sumber: SPSS, data diolah 2024

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -14,636 + 0,334.x_1 + (-7,864E-7).x_2 + (-0,027).x_3 + e$$

- 1) Nilai konstanta -14,636. Hal ini membuktikan bahwa ketika variabel x_1 , x_2 , x_3 bernilai 0 untuk itu variabel Y (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar -14,636.
- 2) Nilai koefisien regresi sebesar 0,334 maka dapat diketahui jika variabel independent yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atas nilai 0,334. Artinya memperlihatkan terjadinya kenaikan nilai TPAK dengan besaran 1% akan menaikkan Tingkat Pengangguran Terbuka senilai 0,334% yang diasumsikan bahwa variabel independent (bebas) yang lain nilainya konstan.
- 3) Nilai koefisien regresi sebesar -7,864E-7 maka dapat diketahui jika variabel independent yaitu Upah Minimum Provinsi dengan nilai -7,864E-7. Artinya memperlihatkan terjadinya kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi dengan besaran satu persen hendak menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka senilai -7,864E-7% yang diasumsikan bahwa variabel independent (bebas) yang lain nilainya konstan.
- 4) Nilai koefisien regresi sebesar -0,027 maka dapat diketahui jika variabel independent yaitu Inflasi dengan nilai -0,027. Artinya memperlihatkan terjadinya penurunan nilai Inflasi dengan besaran 1 persen hendak menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka senilai 0,027% yang diasumsikan bahwa variabel independent (bebas) yang lain nilainya konstan.

Berdasarkan tabel 5 pengujian secara parsial terlihat bahwa:

- a. Pengujian pengaruh TPAK pada tingkat pengangguran terbuka mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,813 > 2,228$) dan nilai signifikansi sebesar $0,103 > 0,05$ maknanya secara parsial belum terdapat pengaruh TAPK atas tingkat pengangguran terbuka dalam taraf kesalahan 5%.

- b. Pengujian pengaruh UMP pada tingkat pengangguran terbuka mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2,401 > 2,228$) serta skor signifikansi senilai $0,040 < 0,05$ maknanya dengan terpisah ada pengaruh UMP pada tingkat pengangguran terbuka dalam taraf kesalahan 5%.
- c. pengaruh inflasi pada tingkat pengangguran terbuka mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-0,280 > 2,228$) serta nilai signifikansi senilai $0,786 > 0,05$ maknanya secara parsial tidak ada pengaruh inflasi pada tingkat pengangguran terbuka dalam taraf kesalahan 5%.

Tabel 6. Uji F ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.813	3	.938	2.551	.121 ^b
	Residual	3.309	9	.368		
Total		6.122	12			

Sumber: SPSS, data diolah 2024

Berdasarkan tabel 6 memiliki persamaan $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($2,551 < 3,708$) serta nilai signifikansi yaitu $0,121 > 0,05$ hingga variabel TPAK, UMP, serta Inflasi dengan serempak tidak berpengaruh pada variabel Y.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pada Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari pengolahan data menunjukkan jika variabel TPAK tidak signifikan ada tingkat pengangguran terbuka dalam taraf kesalahan 5%. Nilai tersebut menunjukkan hipotesis ditolak. Dalam penelitian temuan penelitian ini selaras sama teori ekonomi kalau TPAK yang tinggi hendak menjadikan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Dengan demikian jika fakta di Indonesia bahwa TPAK sejalan dengan teori Keynes dalam (Badria, 2022) menyatakan saat jumlah pekerja melambung, upah cenderung berkurang, yang justru dapat merugikan daripada memberikan benefit. Pengurangan bayaran mengurangi minat beli penduduk pada sejumlah produk, yang nantinya membuat produsen terjadi kerugian serta kesulitan dalam menyerap tenaga kerja. Hasil sesuai (Widiantari et al., 2024) bahwa TPAK tidak mempengaruhi pada tingkat pengangguran terbuka.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Pada Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari pengolahan data menunjukkan jika variabel UMP mempunyai pengaruh signifikan atas tingkat pengangguran terbuka. Nilai tersebut menunjukkan hipotesis diterima. Dalam penelitian (Aisyaturridho et al., 2021) menjelaskan bahwa apabila setiap bayaran yang ditawarkan kurang dari taraf itu, pekerja cenderung enggan mengambil upah itu, yang hendak menjadikan faktor pengangguran. Jika bayaran yang ditentukan oleh kawasan kecil, hal ini hendak menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Dilihat dari perspektif pengusaha,

kenaikan upah hendak mengakibatkan peningkatan biaya produksi yang harus diterbitkan sama industri. Hingga pengusaha akan membuat kebijakan melalui pengurangan tenaga kerja, dengan hal ini mengakibatkan pengangguran. Dengan demikian adapun teori yang mendukung hasil penelitian ini yaitu teori Keynes dalam (Widiantari et al., 2024) yang menyatakan bahwa penetapan upah yang melebihi keseimbangan antara permintaan serta penawaran hendak menjadikan industri mengurangi kebutuhan tenaga kerja serta menurunkan perputaran tenaga, yang pada akhirnya menyebabkan pengangguran. Hasil sesuai (Kartika & Muslim, 2013) bahwa upah minimum provinsi mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.

Pengaruh Inflasi Pada Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari pengolahan data menunjukkan jika variabel inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada tingkat pengangguran terbuka dalam taraf kesalahan 5%. Nilai tersebut menunjukkan hipotesis ditolak. Dalam penelitian oleh (Fahrezi, 2018) mengatakan bahwa ini dikarenakan karena pengangguran di Indonesia tidak berhubungan langsung sama inflasi yang terjadi. Fluktuasi inflasi yang cenderung moderat tidak memberikan dampak signifikan pada total pengangguran. Inflasi hanya akan memengaruhi pengangguran apabila menggapai tingkat tinggi (misalnya di atas 10%), sebab perusahaan hendak terbebani serta cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja. Hasil sesuai (Fahrezi, 2018) bahwa inflasi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi Pada Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil uji F ketiga variabel TPAK, UMP, serta inflasi sama-sama tidak berpengaruh pada variabel Y dalam taraf kesalahan 5%. maknanya H_0 diterima serta H_a ditolak, hingga bisa diambil kesimpulan kalau variabel TPAK, UMP, dan inflasi dengan cara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan pada variabel terikat yaitu TPT Negara kita. Dengan demikian, temuan studi ini memperlihatkan positif serta signifikan atas tingkat Kepercayaan senilai 46% dan sisanya 54% terpengaruhi sama variabel lainnya diluar model penelitian ini.

Temuan studi ini memperlihatkan kalau variabel TPAK, UMP, serta Inflasi tidak berdampak dengan cara simultan pada tingkat pengangguran terbuka. Maka dari itu, pemerintah kembali harus ikut andil dalam permasalahan tingkat pengangguran terbuka ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh, bisa diambil kesimpulan kalau tingkat partisipasi angkatan kerja belum ditemukan pengaruh signifikan pada tingkat pengangguran terbuka. Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja bisa menaikkan tingkat pengangguran negara kita. Kenaikan upah minimum provinsi mampu meminimalkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, sehingga dapat dikatakan upah minimum provinsi ditemukan pengaruh yang signifikan pada tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, inflasi belum memiliki pengaruh yang signifikan akan tingkat pengangguran terbuka, yang mana kenaikan inflasi dapat meminimalkan tingkat pengangguran terbuka. Temuan studi ini dapat digunakan bagi referensi peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup mengingat penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan pemenuhan.

DAFTAR RUJUKAN

- (BPS), (2024). *Tingkat Pengangguran Terbuka*. Diakses pada 5 Oktober 2024, dari <https://www.bps.go.id>
- (BPS), (2024). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*. Diakses pada 5 Oktober 2024, dari <https://www.bps.go.id>
- (BPS), (2024). *Upah Minimum Provinsi*. Diakses pada 5 Oktober 2024, dari <https://www.bps.go.id>
- (BPS), (2024). *Inflasi*. Diakses pada 5 Oktober 2024, dari <https://www.bi.go.id>
- (IMF), (2024). *Unemployment Rate*. Diakses pada 5 Oktober 2024, dari <https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/SEQ/AS5/MEQ>
- Aisyaturridho, Tanjung, A. A., & Hawariyuni, W. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 114–124.
- Badria, F. . (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipan Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 2011-2020 [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO]. In *EKONOMI DAN BISNIS: Percikan Pemikiran* https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XIN-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA58&dq=upah+minimum+and+pertumbuhan+ekonomi&ots=ZoCqYGw2MN&sig=F_BKOXutN2ZPsyru1eYvhQgPq5g%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/15983/1/210717168_frida%20ayu%20badria.pdf
- Fahrezi, R. A. (2018). *ANALISIS PENGANGGURAN DI INDONESIA TAHUN 2001-2017*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/11644>
- Hartati, N. (2020). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 2010-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(1), 92–119. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.86>
- Kartika, R., & Muslim, I. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 3(1), 64–66.
- Nuraeni, A., et all. (2024). Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah. *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)*, 4(3), 696–700. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/4165/3129>
- Prakoso, E. S. (2020). Analisis pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, inflasi dan investasi terhadap tingkat pengangguran di indonesia periode 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), 1–18. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7547>
- Pujoalwanto, B. (2014). *Basuki, P. (2014). Perekonomian Indonesia : Tinjauan historis, teoritis, dan empiris: Vol. cetakan I (cetakan 1)*. GRAHA ILMU.
- Rahmani, A. R. (2021). Pengaruh Gender Ratio, Dependency Ratio, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 1(1), 1–11.
- Setiawan, K., Haikal, M., Wicaksana, A. G., & Dermawan, D. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi TPT di provinsi Banten 2017-2021. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)*, 2(1), 107–120. <https://prin.or.id/index.php/JURRIE/article/download/1112/1189>
- Simbolon, C.M., et all. (2023). Analisis Pengaruh Ipm, Ump Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 451–463. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.113>
- Sinaga, M. E R , Roziani, N. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 7(2), 290–300. <https://doi.org/10.33059/jse.v7i2.8417>

Permatasari, Winanto, Abas. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2010-2023

Widiantari, I. A. A., Sahri, S., & Suriadi, I. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Jumlah Penduduk, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021. *Jurnal Oportunitas : Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 58–64. <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v3i1.607>